

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAGI PETANI DAN USAHA  
KECIL MENENGAH MENDUKUNG MIFEE**  
*ROLE OF MICRO FINANCIAL INSTITUTIONS FOR FARMERS AND MEDIUM  
SMALL BUSINESSES SUPPORT MIFEE*

**Demas Wamaer<sup>1</sup>**

*Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua Barat*

*Received March 17, 2017 – Accepted July 10, 2017 – Available online December 24, 2017*

**ABSTRACT**

*MFI is one of the financial institutions to finance rural economic activities where the majority of the enterprises are in micro or SME segments. Some of the participating villages of PUAP SME programs are generally engaged in agriculture, livestock, and trading of agricultural products. MIFEE sees Indonesia's economic development opportunities through MP3EI. Research objectives: recommendation of the role of MFIs or SMEs in developing a business. Outcome: there are 12 MFIs and 323 SMEs in Merauke, 20 percent are agricultural SMEs that act as capital providers for SMEs and increase farmers' capital. In order for the role of MFIs to be sustainable and increasing, it is necessary to coordinate with Dinas Perindagkop as institutional coach of MFIs with MIFEE related programs. Coordination needs to be done also cooperatives, banks, and colleges to find solutions to capital problems. It is necessary to find an effort to introduce the role of MFIs in assisting farmers or users of other R & D outcomes, in particular leading to reform of MFIs already established in previous programs, such as PUAP and MIFEE.*

*Key-words: MFI, capital, MIFEE*

**INTISARI**

LKM merupakan salah satu kelembagaan keuangan untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro atau UKM. Beberapa desa peserta program PUAP UKM umumnya bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan usaha dagang hasil pertanian. MIFEE melihat peluang pengembangan ekonomi Indonesia melalui MP3EI. Tujuan penelitian: rekomendasi peran LKM atau UKM dalam mengembangkan usaha. Hasil: terdapat 12 LKM dan 323 UKM di Merauke, 20 persennya merupakan UKM pertanian yang berperan sebagai penyedia modal bagi UKM dan peningkatan modal petani. Agar peran LKM berkelanjutan dan meningkat, perlu koordinasi dengan Dinas Perindagkop sebagai kelembagaan pembina LKM disertai program terkait MIFEE. Koordinasi perlu dilakukan juga koperasi, bank, dan perguruan tinggi untuk mencari solusi permasalahan permodalan. Perlu temu usaha untuk memperkenalkan peran LKM dalam membantu petani atau pengguna hasil litbangyasa lainnya, terutama mengarahkan pada pembenahan LKM yang sudah terbentuk pada program sebelumnya, seperti PUAP dan MIFEE.

Kata kunci: LKM, Modal, MIFEE

---

<sup>1</sup> Alamat penulis untuk korespondensi: Demas Wamaer. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua Barat. Email: [wamaerdemas@yahoo.com](mailto:wamaerdemas@yahoo.com)

## PENDAHULUAN

**Latar Belakang.** Pembangunan nasional Indonesia difokuskan pada beberapa program seperti penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kesempatan kerja, revitalisasi pertanian dan pedesaan. Untuk negara-negara berkembang, pembangunan tidak bisa terlepas dari wilayah pedesaan. Hal ini terjadi karena sebagian besar penduduk di negara berkembang masih bermukim di daerah pedesaan dan mayoritas masih dalam kondisi miskin. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di negara berkembang dapat dilihat dari perkembangan di wilayah pedesaan itu sendiri (Yustika 2003:27).

Sesuai dengan pencitraan pedesaan pada umumnya, komunitas pedesaan identik dengan para petani ataupun nelayan dan kehidupannya yang serba terbatas dalam hal akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Oleh karena itu, kehidupan pedesaan tidak lepas dari perilaku ekonomi yang khas dari keluarga petani-nelayan, yaitu pola kelembagaan ekonomi pedesaan yang belum dapat meninggalkan ciri masyarakat ekonomi pertanian yang berorientasi subsisten (Scott 1981). Kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, pengrajin, buruh serta pengecer. Namun demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik, yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang

gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan (Hamid 1986). Dalam jangka panjang, kelangkaan modal bisa menjadi *entry point* terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang sulit untuk diputus, sehingga mereka bisa terjebak sebagai masyarakat marginal.

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal serta dengan kemampuan fiskal pemerintah yang semakin berkurang, maka perlu upaya untuk lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi masyarakat pedesaan. Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Secara sederhana, LKM dapat diartikan sebagai suatu lembaga jasa layanan keuangan tabungan dan kredit (simpan-pinjam) dalam skala mikro dan kecil yang berkelanjutan bagi masyarakat yang mempunyai usaha skala mikro dan kecil. Bentuk-bentuk dari LKM ini beraneka ragam, bisa berbentuk rentenir sampai berbentuk koperasi simpan pinjam. Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan indikator berjalannya roda perekonomian di suatu desa, mengingat populasi UKM pada tahun 2007 di Indonesia mencapai 49,8 juta (99 persen) dari jumlah usaha 49,845 unit usaha.

Menurut Sihombing & Djufry (2010), program dana bergulir PUAP dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian mulai dilaksanakan pada tahun 2009 dengan proses penyaluran dana melalui tim independen yang ada di pemerintah daerah c.q dinas-dinas lingkup pertanian di daerah telah dilaksanakan.

Program dana bergulir tersebut dikelola melalui program PUAP. Program tersebut menjadi tantangan untuk LKM, karena perlu diupayakan agar dapat diperoleh laba tahunan. Oleh karena itu, perumusan strategi yang dapat dilakukan oleh LKM-LKM untuk menghadapi kondisi terkini, adalah melaksanakan enam prioritas inisiatif strategi, yaitu (1) Melaksanakan pelayanan yang memuaskan nasabah, promosi produk untuk meningkatkan citra LKM, (2) Merespon informasi dan keluhan nasabah, (3) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi, (4) Meningkatkan iklim kinerja yang kondusif dan memenuhi harapan anggota, (5) Memperkuat permodalan dan, (6) Meningkatkan DPK (Dana Pihak Ketiga). Maka LKM seharusnya melakukan beberapa hal seperti: melakukan pengambilan keputusan inisiatif strategi yang akan diambil, hendaknya pihak pengurus LKM dapat memperhatikan hal yang sama pada setiap perspektif secara seimbang, tidak hanya terfokus pada perspektif finansial saja, yang diperlukan dalam pengembangan LKM. Meningkatkan pelayanan yang memuaskan nasabah dalam proses penyaluran kredit dan merespon informasi dan keluhan nasabah merupakan prioritas pertama dan kedua yang perlu dilakukan. Program dana bergulir yang dikelola LKM diharapkan meningkatkan kinerja pelayanan yang memuaskan kepada nasabah, untuk meningkatkan perolehan laba.

UKM di beberapa desa peserta program PUAP, bergerak di berbagai bidang, antara lain pertanian, peternakan, dan usaha dagang hasil-hasil pertanian. UKM-UKM tersebut didukung oleh LKM yang memberikan bantuan berupa modal, uang tunai berasal dari program PUAP, yang diharapkan membantu peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan LKM tentunya tidak terlepas dari perkembangan UKM. Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan mikro ini lebih mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan umum maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan mikro sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil. Mengingat pentingnya ranah ekonomi yang merupakan titik sentral dalam kehidupan masyarakat pedesaan, maka dalam pembangunan ekonomi di desa-desa peserta program PUAP diperlukan upaya untuk merevitalisasi kelembagaan khususnya di bidang ekonomi untuk bisa memaksimalkan sumberdaya yang ada di masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) sebagai program pemerintah dalam melihat peluang pengembangan ekonomi Indonesia melalui MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia). Dalam hal ini Konsep Pengembangan Pangan dan Energi Skala Luas (*Food and Energy Estate*) di Merauke merupakan kegiatan pertanian skala luas, modern dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis iptek, modal, organisasi dan manajemen modern serta mengedepankan kearifan lokal (*local wisdom*) di bidang pengelolaan lingkungan dan teknik budidaya pertanian (Bappeda Prov. Papua 2010).

Menurut Bappeda Papua (2010), jika program MIFEE dilaksanakan, maka akan menjadi salah satu motor penggerak untuk

memecahkan masalah ketertinggalan wilayah di Papua. Hal ini akan ikut menyumbang keberhasilan otonomi khusus dan program percepatan dan amanat Inpres No. 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang salah satu programnya mengatur tentang Merauke sebagai Kawasan Ekonomi Khusus bidang pangan dan energi (MIFEE).

**Pokok Permasalahan.** Beberapa permasalahan yang perlu dikaji berdasarkan latar belakang di atas, diantaranya:

1. Bagaimana peranan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) mampu mengembangkan ekonomi lokal di Desa-desa yang terlibat program MIFEE?
2. Apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi UKM di desa-desa pesertaprogram MIFEE?
3. Bagaimana strategi pengembangan LKM agar dapat eksis dalam menopang pembangunan desa – desa tersebut?

**Maksud dan Tujuan Penelitian.** (1) Menganalisis peranan LKM dalam mengembangkan ekonomi lokal desa peserta program MIFEE di Merauke, (2) Mengkaji dan menganalisis apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi UKM di desa – desa peserta program MIFEE, (3) Menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka mengembangkan kapasitas LKM maupun UKM.

## **METODOLOGI**

**Waktu dan Lokasi Penelitian.** Kegiatan dilaksanakan di beberapa kampung peserta program PUAP di Kabupaten Merauke (Tanah Miring, Kurik, dan Sota). Lokasi terpilih diambil karena keterlibatannya

dalam program PUAP yang terasa perlu dievaluasi perkembangan bantuan modal yang diterima anggota sesuai dengan jenis usaha tani yang digelutinya. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka fokus dari kegiatan ini untuk melihat dukungan program MIFEE terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan pada umumnya.

**Ruang Lingkup Kegiatan.** Kegiatan ini meliputi empat tahap yang dilaksanakan selama tujuh bulan (Maret sampai dengan September 2012). Tahap pertama adalah pengumpulan literatur. Tahap kedua adalah penyusunan proposal kegiatan. Tahap ketiga adalah pengumpulan data untuk pencapaian kegiatan. Adapun kegiatan tahap keempat adalah pengolahan data sampai penyelesaian draft kegiatan dan pembuatan laporan akhir. Pelaksanaan kegiatan secara bertahap meliputi pengumpulan data sekunder dan primer, wawancara dengan para pengambil kebijakan, tokoh adat maupun tokoh masyarakat, dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data.

**Bentuk Kegiatan.** Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk survey untuk mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi yang telah dilaksanakan pemerintah (Kementan), seperti PUAP, menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu peristiwa atau gejala sosial yang dalam hal ini mengenai eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk mengetahui kondisi tentang permasalahan penelitian yang didasarkan pada pemahaman

serta pembentukan pemahaman yang diikat oleh teori terkait dan penafsiran peneliti.

Data yang dihasilkan merupakan hasil pengamatan dari kegiatan penelitian terhadap LKM terkait. Data tambahan yang berkaitan dengan topik penelitian didapatkan melalui studi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian yang digunakan sebagai data tambahan untuk memperkaya substansi penulisan laporan. Data yang diperoleh secara kualitatif di lapangan akan dikuantifikasi dengan alat analisis yang digunakan, yaitu SWOT, sehingga diperoleh hasil yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Respondennya adalah UKM dan pengurus LKM. Besar ukuran dari UKM adalah sembilan, dan dipilih secara acak UKM yang tidak tersentuh oleh LKM dan tiga orang narasumber ahli, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang representatif dan relevan dengan masalah LKM. Besarnya ukuran pengurus LKM ditentukan secara insidental di lokasi kegiatan.

Data kualitatif yang dihasilkan selama penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Data hasil pengamatan: tulisan dalam bentuk deskripsi mengenai situasi, kejadian atau peristiwa, orang-orang, interaksi, dan perilaku yang diamati secara langsung di lapangan, yang disajikan dalam bentuk catatan lapang, saat penulis melakukan pengamatan.
- b. Data hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan responden yang diamati dalam kegiatan ini, mengenai pengalaman, sikap, keyakinan dan pandangan atau pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara dengan peneliti.
- c. Data tertulis: petikan atau keseluruhan bagian dari dokumen yang berkaitan dengan keberadaan usaha masyarakat

dan LKM yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi.

Data primer dikumpulkan dari usaha masyarakat meliputi karakteristik individu, jenis usaha, dan persepsinya terhadap LKM, sedangkan dari pengurus LKM terkait dengan profil keorganisasian, yaitu pengkategorian LKM, histori pembentukan, dimensi organisasi LKM, pengembangan skema perkreditan, dan unsur-unsur keberlanjutannya. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi pendekatan wawancara individual (*indepth interview*) telaah mendalam, dan diskusi kelompok. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan dan pelaporan yang terkait dengan pengembangan pelayanan jasa keuangan mikro.

Analisis data kualitatif dilakukan secara berlanjut, berulang, dan terus menerus yang terdiri dari pengumpulan data, analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan. Kemudian data-data tersebut direduksi melalui proses pemilihan dan pengkategorian data-data yang sesuai. Reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir strategi pengembangan LKM dalam pembangunan ekonomi pedesaan dapat dirancang dengan tepat.

Data kuantitatif mengenai penilaian faktor-faktor pengelolaan untuk menentukan arahan strategi pengembangan LKM, baik faktor internal maupun eksternal, dianalisis dengan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) untuk memperoleh arahan kebijakan yang tepat dalam pengembangan LKM, khususnya LKM di lokasi penelitian. Sebelum melakukan analisis SWOT

dilakukan evaluasi terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang berdampak pada kesuksesan atau kegagalan dalam pengembangan LKM. Evaluasi tersebut dalam bentuk matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE).

Secara umum dikatakan kekuatan, apabila kondisi internal tersebut menjadi pendorong keberhasilan sistem dan kelemahan apabila kondisi internal tersebut menjadi hambatan bagi sistem. Adapun peluang, apabila kondisi eksternal menjadi pendorong keberhasilan sistem dan ancaman, apabila kondisi eksternal menjadi hambatan keberhasilan sistem. Semua faktor tersebut ditentukan bobotnya, di sini bobot memperlihatkan tingkat kepentingan faktor tersebut. Jumlah bobot seluruh faktor, baik internal maupun eksternal, harus sama dengan 1,0 atau 100 persen. Umar (2008) menyatakan pilihan bobot terdiri dari:

1. 0,20 atau 20 persen : tinggi atau kuat
2. 0,15 atau 15 persen : di atas rata-rata
3. 0,10 atau 10 persen : rata-rata
4. 0,05 atau 5 persen : di bawah rata-rata
5. 0,00 atau 0 persen : tidak terpengaruhi

Setelah menentukan bobot dari masing-masing faktor, kemudian menentukan *rating* dari masing-masing faktor tersebut, dengan pilihan *rating* menurut Umar (2008) sebagai berikut.

1. *Rating 4* : responden superior terhadap faktor-faktor tersebut
2. *Rating 3* : responden di atas rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut
3. *Rating 2* : responden rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut
4. *Rating 1* : responden di bawah rata-rata terhadap faktor-faktor tersebut.

Jika bobot dan *rating* telah ditentukan, maka data tersebut dapat diolah menjadi arahan strategi pengembangan LKM dengan menggunakan analisis SWOT. Matriks

SWOT merupakan *matching tools* yang penting untuk membantu LKM dalam mengembangkan empat tipe strategi, yaitu:

1. SO Strategies: di sini kekuatan internal sistem digunakan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar sistem
2. WO Strategies: bertujuan untuk memperkecil kelemahan internal sistem dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal
3. ST Strategies: di sini sistem berusaha agar mampu menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal
4. WT Strategies: merupakan taktik untuk bertahan yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan internal dan menghindari ancaman-ancaman lingkungan

#### **Metode Pencapaian Target Kinerja. Kerangka-Rancangan Metode Penelitian.**

Dalam rangka mencapai target kinerja, pelaksanaan kegiatan tersusun dengan metode dan proses yang mengacu pada faktor-faktor yang harus diperhitungkan, agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan untuk menjawab tujuan dan sasaran penelitian. Hal itu dilakukan dengan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan (juknis) yang memuat metode dan proses pelaksanaan kegiatan, jumlah personil yang terlibat, data yang perlu dikumpulkan, dan waktu yang digunakan. Juknis juga dilengkapi dengan kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data.

#### **Indikator Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja.**

Indikator keberhasilan dapat dilihat dari telah dicapainya tujuan penelitian berupa rekomendasi mengenai peran LKM sebagai penyedia modal bagi petani atau UKM dalam mengembangkan usahanya, dengan mengacu pada tahapan kegiatan

yang dilaksanakan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**Hasil Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal.** Untuk mempelajari peran LKM, hasil evaluasi faktor internal dan eksternal yang terkait dengan peran LKM dalam pengembangan UKM disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Faktor Internal (EFI) dan Eksternal (EFE) Pengembangan LKM di Merauke

Uraian Faktor Internal dan Eksternal	Bobot	Rating	Skor
<b>Kekuatan :</b>			
Kepemilikan asset sumberdaya lahan	0,098	4	0,392
Gotong Royong	0,098	4	0,392
Motivasi untuk maju/berkembang	0,105	4	0,420
<b>Kelemahan:</b>			
Rendahnya kemampuan modal keluarga tani (kaitannya dengan pembiayaan usahatani)	0,128	1	0,128
Rendahnya ketrampilan budidaya tanaman pangan (kaitannya dengan penerapan teknologi secara baik)	0,105	2	0,210
Rendahnya kemampuan manajerial (kaitannya dengan pengelolaan usahatani)	0,098	2	0,196
Minimnya ketersediaan tenaga kerja keluarga	0,143	1	0,143
Dinamika kelembagaan LKM	0,135	2	0,270
Rendahnya persepsi masyarakat tani terhadap program PUAP	0,090	1	0,090
<b>Jumlah Skor</b>	<b>1,000</b>		<b>2,249</b>
<b>Peluang :</b>			
Pengembangan pangan didukung kebijakan dan program MIFEE	0,086	3	0,172
Pasar komoditi pangan selalu tersedia	0,073	3	0,146
Tingkat kesesuaian dan luasan SDL	0,058	4	0,232
Lancarnya sarana transportasi	0,123	2	0,256
Adanya institusi penyuluhan	0,087	2	0,174
Adanya institusi penelitian dan pengkajian	0,068	2	0,136
Komoditi berorientasi ekspor	0,109	1	0,109
<b>Ancaman :</b>			
Fluktuasi harga/murahnya komoditi pangan	0,118	3	0,354
Tingginya serangan hama terhadap tanaman pangan	0,073	4	0,292
Implementasi program tidak sesuai dengan perencanaan	0,077	3	0,231
Tingginya Isolasi wilayah pengembangan	0,132	2	0,264
<b>Jumlah Skor</b>	<b>1,000</b>		<b>2,366</b>

Berdasarkan Tabel di atas, maka dapat dilakukan analisis SWOT seperti tertuang pada gambar 1.

Faktor-faktor Internal	Strenghts (S)	Weaknesses (W)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi sumberdaya alam tersedia</li> <li>• Terbentuknya Kelompok Tani/UKM</li> <li>• Tersedianya bahan baku</li> <li>• Adanya kelembagaan ekonomi</li> <li>• Potensi pertumbuhan penduduk</li> <li>• Hubungan positif antara pendapatan dan konsumsi pangan</li> <li>• Kemajuan infrastruktur dan transportasi</li> <li>• Tersedia sarana pemasaran (toko dan kios saprodi)</li> <li>• Kepemilikan aset (lahan)</li> <li>• Sifat gotong royong dan ikatan sosial masih tinggi</li> <li>• Pengetahuan dan kearifan lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketrampilan teknis relatif rendah</li> <li>• Sarana dan prasarana produksi pertanian tidak memadai.</li> <li>• Harga faktor produksi dengan produksi tidak sebanding.</li> <li>• Benih/bibit dan obat-obatan didatangkan dari luar .</li> <li>• Kekurangan modal usaha.</li> <li>• Posisi tawar terhadap saprodi lemah.</li> <li>• Tata niaga produk masih lemah</li> <li>• Masih terdapat praktek ijon dan pinjaman modal yang tinggi</li> </ul>
Faktor-faktor Eksternal: Oppurtunities (O)	(1) SO Strategies	(2) WO Strategies
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peluang pasar</li> <li>• Lingkungan strategis</li> <li>• Peluang bisnis</li> <li>• Dukungan pemerintah melalui dana pemberdayaan (otsus)</li> <li>• Harga mesin pengolahan hasil terjangkau kelompok tani</li> <li>• Pengembangan protipe mesin sederhana</li> <li>• Adanya Pola kemitraan</li> <li>• Diversifikasi usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pengembangan LKM akan menguntungkan masyarakat, karena memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh modal yang mudah, dan tersedia di tempat. Untuk itu dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah melalui jalinan kerja antara semua institusi baik pemerintah maupun swasta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas peningkatan SDM (ketrampilan, motivasi, manajerial, pengetahuan dan teknologi), akan mendukung pemanfaatan dana pemberdayaan (seperti, RESPEK maupun PUAP).</li> <li>• Penyiapan sarana prasarana pendukung industri pangan dan energy</li> </ul>
Threats (T)	(3) ST Strategies	(4) WT Strategies
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguasaan tanah adat</li> <li>• Penguasaan teknis pengoperasian mesin.</li> <li>• Motivasi petani relatif rendah</li> <li>• Endemi penyakit.</li> <li>• Pasokan produk dari luar daerah .</li> <li>• Persaingan pangan dan energy pada masa krisis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pemahaman melalui pembinaan, karena masih kuatnya ikatan sosial dan jiwa gotong royong, maka akan mempermudah masyarakat mengembangkan diri dengan mengusahakan komoditas tanaman pangan dan energy yang berdaya saing tinggi di pasar dengan pengetahuan dan kearifan lokal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pelatihan-pelatihan praktis yang berhubungan dengan pengelolaan industri, pengembangan usaha, dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari dalam upaya penguatan kelembagaan.</li> <li>• Menciptakan industri pangan atau bahan baku untuk meningkatkan nilai tambah.</li> </ul>

Gambar 1. Matriks Analisis SWOT pengembangan LKM dan UKM di Merauke



**Potensi Pengembangan ke Depan. Kerangka Pengembangan ke Depan.** Sampai saat ini, program MIFEE masih diprogramkan oleh Pemda Merauke, maka hal ini hendaknya mendapat dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat. Hal ini dapat dimulai dengan melakukan penyusunan *grand design* pengembangan Kabupaten Merauke untuk menjadi lumbung pangan dan energi bagi Kawasan Timur Indonesia atau paling tidak untuk provinsi Papua.

**Strategi Pengembangan ke Depan.** Berdasarkan hasil evaluasi EFI dan EFE (Tabel 1) dan juga analisis SWOT (Gambar 1), dapat dikemukakan empat strategi LKM, yaitu: (1) SO Strategi: program yang mendorong terjalannya kerjasama usaha pertanian dengan pihak swasta (perusahaan pertanian yang ingin melakukan investasi) dengan Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan), (2) ST Strategi: program pembinaan atau pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, (3) WO Strategi: program penyediaan sarana-prasarana maupun teknologi untuk mendukung pengembangan pertanian dan perkebunan yang diprogramkan instansi lingkup pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan), baik di tingkat kabupaten Merauke, Provinsi Papua, maupun pemerintah pusat, dan (4) WT Strategi: program penguatan kelembagaan, terutama kelembagaan adat (hak penguasaan tanah atau masalah tanah) dan kelembagaan yang terkait dengan usaha tani (BPR atau BPD atau Koperasi) maupun dengan kelompok tani melalui pelatihan.

**Sinergi Koordinasi Kelembagaan-Program. Kerangka Sinergi Koordinasi Kelembagaan-Program.** Dalam memainkan

perannya dalam menyediakan modal bagi petani atau UKM pada umumnya, pembinaan dari kelembagaan terkait terhadap LKM telah dilakukan terutama Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Merauke. Hal ini diharapkan mendorong LKM untuk mendukung program pengembangan UKM, pembinaan tersebut dapat bersinergi, maka kajian ini diharapkan dapat mendorong terjadinya sinergi antara Kelembagaan Pembina dan program MIFEE yang telah dicanangkan.

**Indikator Keberhasilan Sinergi Koordinasi Kelembagaan-Program.** Dalam hal ini adalah program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan pada masyarakat miskin atau terpinggirkan. Hal itu dapat dicapai melalui kajian strategi kebijakan pengentasan kemiskinan (termasuk UKM) dan pemberdayaan masyarakat miskin atau terpinggirkan melalui pembukaan kesempatan kerja produktif dan inovatif, termasuk bidang pariwisata untuk menghasilkan imbalan (pendapatan).

**Perkembangan Sinergi Koordinasi Kelembagaan-Program.** Koordinasi antar-kelembagaan yang ada pada umumnya belum berjalan secara sinergi. Hal ini menyebabkan banyak program tidak berkelanjutan, karena tidak saling bersinergi. Padahal setiap kelembagaan yang ada memiliki sasaran yang sama, misalnya petani penerima PUAP tidak bersinergi dengan program pengembangan LKM yang dijalankan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Oleh karena itu perlu dibangun koordinasi antar-institusi.

**Kerangka Pemanfaatan Hasil Litbangyasa. Kerangka dan Strategi Pemanfaatan Hasil Litbangyasa.**

Pemanfaatan hasil litbangyasa oleh petani dan pengguna pada umumnya, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Hal itu dilakukan dengan memberi peluang kepada petani dan pengguna untuk memanfaatkan hasil litbangyasa, termasuk rekomendasi yang digunakan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan bagi pembangunan daerah oleh instansi terkait untuk pembinaan masyarakat.

Strategi yang digunakan dalam memberi peluang kepada pengguna, baik LKM, UKM, maupun Pemda untuk memanfaatkan hasil litbangyasa dilakukan melalui diseminasi dan ekspose hasil litbangyasa. Baik melalui pameran, temu usaha, pendistribusian bahan cetak, baik inovasi teknologi maupun inovasi kelembagaan melalui penyampaian rekomendasi hasil litbangyasa.

**Indikator Keberhasilan Pemanfaatan Hasil Litbangyasa.** Keberhasilan pemanfaatan hasil litbangyasa diindikasikan oleh terjadinya peningkatan produktivitas usaha pertanian dan secara khusus untuk penelitian peran LKM sebagai penyedia modal bagi petani ini dapat dilihat dari berkembangnya usaha pertanian dan meningkatnya laba yang diperoleh LKM serta dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari hasil penelitian oleh Pemda setempat.

**Perkembangan Pemanfaatan Hasil Litbangyasa.** Secara khusus mengenai petani yang memanfaatkan hasil litbangyasa di Merauke, dapat dikatakan telah berhasil meningkatkan produktivitas usaha tani terutama padi di Merauke. Begitu pula dengan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian sebelumnya telah menjadi landasan bagi pengembangan padi di Merauke. Oleh karena itu peran LKM dalam

membantu petani diharapkan akan menjadi rekomendasi yang membantu Pemda dalam pembinaan petani dan pengguna lainnya ke depan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

**Kesimpulan.** Untuk mencapai kinerja yang lebih baik, maka perlu dilakukan pendekatan koordinatif, baik dengan Pemda (Dinas Perindagkop) sebagai kelembagaan pembina LKM maupun dengan program yang akan direncanakan terkait MIFEE. Selain itu juga pendekatan koodinatif perlu dilakukan juga dengan lembaga atau institusi terkait lainnya seperti koperasi, bank, dan perguruan tinggi terkait upaya mencari solusi bagi permasalahan permodalan.

Untuk pengembangan usaha perlu dilakukan temu usaha untuk memperkenalkan peran LKM dalam membantu petani atau pengguna hasil litbangyasa lainnya dalam meningkatkan produktivitasnya.

Program MIFEE yang berasal dari pemerintah daerah Merauke sampai saat ini masih tetap diprogramkan, walaupun belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Namun demikian dukungan program sektoral Kementerian Pertanian seperti PUAP masih terus dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BPTP sebagai salah satu instansi pusat yang berkedudukan di daerah (Provinsi Papua).

Dalam memperkenalkan inovasi hasil penelitian yang memungkinkan petani dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya, maka akan dilakukan sosialisasi dan apresiasi hasil-hasil pengkajian langsung dengan petani tentang inovasi yang digunakan dalam kegiatan pengkajian BPTP Papua di Merauke. Untuk inovasi yang digunakan, terutama

mengarahkan pada pembenahan LKM yang sudah terbentuk pada program-program sebelumnya seperti PUAP dan MIFEE.

**Saran.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKM sudah cukup berperan, terutama 12 LKMA yang mendapat dana *block grand* PUAP dari Kementerian Pertanian sebesar Rp 100 juta per Gapoktan. Oleh karena itu perlu pembinaan agar LKM-LKM tersebut terus berkembang.

Adapun kredit yang berasal dari bank pemerintah maupun swasta untuk mendorong pengembangan UKM, perlu juga didorong untuk berperan dalam program MIFEE.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ADB. 2000. *Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy*. Manila. Asian Development Bank.
- Bappeda Prov. Papua. 2010. *Grand Design Pengembangan Pangan dan Energi Skala Luas (Food and Energy Estate) di Merauke*. Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Provinsi Papua. Jayapura.
- Bintoro. 2003. *Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Bappenas. Jakarta.
- Eko, S. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. APMD Press: Yogyakarta.
- Ellis, F. & S. Biggs. 2001. Evolving Themes in Rural Development 1950s-2000s. *Development Policy Review*, Vol. 19, No. 4: 437-448.
- Hamid, E.S. 1986. Rekaman dari Seminar. *Dalam Mubyarto & Edy Suandi Hamid (Eds.). Kredit Pedesaan di Indonesia*. BPFE Yogyakarta.
- Hendayana, R. & J. B. Alfons. 2008. Kebutuhan Teknologi untuk UMKM Sektor Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan. Dalam *Prosiding Semnas Akselerasi Inovasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mendukung Ketahanan Pangan di Wilayah Kepulauan* (Eds.: J.B. Alfons, E. Papilaya, J.E. Salamena, M.P. Sirappa, S.Th. Raharjo, W. Girsang dan M.L.J. Titahena). Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Bogor.
- Hendayana, R. & S. Bustaman. 2005. *Fenomena Lembaga Keuangan Mikro dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Bogor.
- Hubies, M. 2004. *Modul Pengantar Industri Kecil dan Menengah*. Magister Profesional Industri Kecil dan Menengah. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Ledgerwood, J. 1999. *Microfinance Handbook. An Institutional and Financial Perspective*. Washington DC.: The World Bank.
- Nasution, I. 2007. *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*. Marjin Kiri. Jakarta.
- Marshus, B. Y. 1995. Industri Pedesaan Menghindari Perangkap Involusi dan Stagnasi Pendapatan. *Prisma*. No. 8, Tahun XXIV.
- Martowijoyo, S. 2005. Masa Depan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Pengaturan dan Pengawasan. <http://www.indonesiaindonesia.com/f/8669-masa-depan-lembaga-keuangan-mikro-indonesia>.
- Masyhuri. 1999. Kebijakan Pembangunan Pertanian. *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. VI/No.2. Des/1999:Hal.71-78. Jurusan

- Sosial Ekonomi Pertanian. Universitas Gadjah Mada.
- Panggabean, R. 2005. *Kerjasama Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK.
- Pantoro, Setyo. 2008. *Pendekatan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Implikasinya*. Koran-rakyat-online.
- Scott, J. C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES. Jakarta.
- Sumodiningrat, G. 2003. Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam Menanggulangi Kemiskinan Terkait dengan Kebijakan Otonomi Daerah. Artikel Tahun II no. 1 *Jurnal Ekonomi Pertanian*. [www.ekonomirakyat.go.id/co.id](http://www.ekonomirakyat.go.id/co.id).
- Syahyuti, 2004. *Strategi dan Tantangan dalam Pengembangan Gabungan Petani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Syukur, M. 2006. Membangun Lembaga Keuangan Mikro Pertanian yang Berkelanjutan: Sebuah Pengalaman Lapangan. *Warta Prima Tani*. Volume 1 no. 1. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- Umar, H. 1999. *Riset Strategi Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Yustika, A. E. 2008. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Bayumedia Publishing: Jakarta.